

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adjie, Habib, 2011, *Hukum Notaris Indonesia*, Aditama, Jakarta.
- , 2013, *Sanksi Perdata dan Administrasi Terhadap Notaris*,
PT.Refika Aditama, Bandung.
- Anshori, Abdul Ghofur, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif
Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta.
- Ash-Shofa, Burhan, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Keempat, PT.
Rineka Cipta, Jakarta.
- Griffin Ricky W dan Ebert Ronal J, 2007, *Bisnis*, Edisi ke delapan, Penerbit
Erlangga, Jakarta.
- Handoko, T. Hani, 2009, *Manajemen*, BPFE-Yogyakarta, Yogyakarta.
- Hartanti Sulihandari dan Nisya Rifiani, 2013, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi
Notaris*, Dunia Cerdas, Jakarta.
- Kusumaatmadja, Mochtar dan Sidharta, B. Arief, 2000, *Pengantar Ilmu
Hukum*, Penerbit Alumni, Bandung
- Manulang M, 2002, *Dasar-Dasar Manajemen*, Gadjah Mada University
Press, Yogyakarta.
- Nasution,S, 2006, *Metode Research (PenelitianIlmiah)*, Cetakan ke-8, Bumi
Aksara, Jakarta.
- S.P, Siagian, 2003, *Filsafat Administrasi*, Edisi Revisi, Cetakan Pertama, PT.
Bumi Aksara, Jakarta.
- Sjaifurrachman, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan
Akta*, Mandar Maju, Bandung.
- Soekanto, Soerjono, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas
Indonesia Press, Jakarta.
- Soekanto, Soejono dan Mamudji, Sri, 2010, *Penelitian Hukum Normatif*,
Rajawali Press, Jakarta.
- Suharsimi, Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*,
PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Sujamto, 1983, *Beberapa Pengertian diBidang Pengawasan*, Ghalia
Indonesia, Jakarta.
- , 1987, *Aspek-Aspek Pengawasan di Indonesia*, Sinar Grafika,
Bandung.

Sumardjono Maria SW, 2014, *Bahan Kuliah Metodologi penelitian Hukum*, Yogyakarta.

Tim Redaksi, 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cetakan 3 Edisi III, Balai Pustaka, Jakarta.

Untung, H. Budi, 2001, *Visi Global Notaris*, Andi, Yogyakarta.

Widiyanti, Ninik, 2007, *Manajemen Koperasi, Rineka Cipta*, Jakarta.

B. Jurnal/ Tesis

Yosep, Bambang Dwi Atmojo “Pengawasan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Terhadap Notaris Yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik Di kota Surakarta”, *Tesis*, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2013.

Ghessa, Nashara Tasya, “Peran Majelis Pengawas Daerah Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Yang Menghadapi Masalah Hukum Di Jakarta Timur”, *Tesis*, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2013.

C. Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4432.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR08.10 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris.

Keputusan Menteri Kehakiman No.M-0L.H.T.03.01 Tahun 2003 tentang KeNotarisan.

D. Internet

Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, "Daftar Nama Notaris Kota Yogyakarta", [http://jogja.kemenkumham.go.id/layananpublik/pelayanan-hukum-dan-ham/kenotariatan/2015-03-25-06-17-01/kota Yogyakarta](http://jogja.kemenkumham.go.id/layananpublik/pelayanan-hukum-dan-ham/kenotariatan/2015-03-25-06-17-01/kota-Yogyakarta), Diakses Tanggal 31 Oktober 2015.

Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum, "Syarat Dan Tata Cara Pengangkatan Notaris," <Http://Www.Kemenkumham.Go.Id/V2/Informasi-Publik/Faq/220-F-A-Q-Layanan-Ditjen-Ahu>, Diakses Pada Tanggal 1 Oktober 2015.

Kementerian Agama Republik Indonesia, "Standar Pelayanan Wakaf Di Tahun 2013," <Http://Simbi.Kemenag.Go.Id/Pustaka/Images/Materibu/ku/Standar%20Peayanan%20Wakaf%20bagi%20pejabat%20pembuat%20akta%20ikrar%20wakaf%20PPAIW-2013.Pdf>, Diakses Tanggal 5 Oktober 2015.